

## PEMBERDAYAAN SDM BUMDESA: STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Ragil Kuncoro<sup>1\*</sup>, Sony  
Hartono<sup>2</sup>, Oke Wibowo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi, Politeknik Keuangan  
Negara STAN, Jakarta,  
Indonesia.

<sup>2</sup> Penilai, Politeknik Keuangan  
Negara STAN, Jakarta,  
Indonesia.

<sup>3</sup> Manajemen Aset, Politeknik  
Keuangan Negara STAN,  
Jakarta, Indonesia.

Artikel

Diterima : 02 Juli 2024

Disetujui : 09 Agustus 2024

Email:

ant\_ragil\_kun@pknstan.ac.id

### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Bumdesa di Kabupaten Tulungagung dalam mengelola laporan keuangan. Dengan menggunakan pendekatan pengembangan kapasitas SDM, pengelola Bumdesa mendapatkan pelatihan administrasi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Operasionalisasi pengabdian Masyarakat dimulai dengan memilih 20 pengurus Bumdesa yang diikutkan dalam pelatihan *training of trainers*. Para *trainers* yang sudah lulus pelatihan mendapat kesempatan untuk mengembangkan pendampingan dan pelatihan ke rekan sejawat pengelola Bumdesa di wilayahnya masing-masing. Dalam rentang waktu tiga bulan, tim pengabdian masyarakat turut mendampingi para pengelola Bumdesa secara *online*. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan terjadi peningkatan jumlah Bumdesa yang menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Bumdesa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Kata Kunci:** bumdesa, administrasi laporan keuangan, standar akuntansi keuangan, pengembangan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat

### Abstract

*This community service activity aims to develop the capacity of human resources for Bumdesa managers in Tulungagung Regency to manage financial reports. Using an HR capacity development approach, Bumdesa managers receive training in financial report administration per applicable financial accounting standards. This approach was chosen to solve the problem of a shortage of human resources who have competence in the accounting field. Operationalization of community service began by selecting 20 Bumdesa administrators who were included in the training of trainers. Trainers who have passed the training have the opportunity to develop mentoring and training for fellow Bumdesa managers in their respective regions. Within three months, the Community Development Team assisted the Bumdesa managers online. The results of community service show that there has been an increase in the number of Bumdesa submitting financial reports as a form of accountability for Bumdesa management to the Community and Village Empowerment Service.*

**Keywords:** bumdesa, financial report administration, financial accounting standards, HR capacity development, community empowerment

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa atau Bumdesa memiliki arti sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pengertian ini tidak terlepas dari cita-cita dan harapan Nawacita akan makna penting Bumdesa. Dalam konsep Nawacita, kehadiran Bumdesa di pedesaan merupakan merupakan strategi mewujudkan manifestasi kehadiran institusi negara bagi masyarakat desa. Kementerian PDPT (2015) menggunakan istilah Tradisi Berdesa untuk mempopulerkan konsep tersebut. Tradisi Berdesa merupakan upaya membangun Indonesia melalui pengembangan ekonomi desa secara kolektif yang bermuara pada kemandirian ekonomi desa. Roda ekonomi bergerak dengan hadirnya unit-unit usaha strategis di desa-desa. Dengan strategi ini, pemerintah berharap terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Kementerian PDPT, 2015).

Dalam perjalanannya, pengembangan Bumdesa tidak serta merta berjalan mulus. Hasil penelitian Badan Pemeriksa Keuangan (2018) menunjukkan kendala-kendala yang terjadi, seperti misalnya penyampaian laporan Bumdes yang masih rendah (1034 bumdes), penatausahaan dan pelaporan Bumdesa belum tertib (864 bumdes) serta sumber daya manusia pengelola bumdesa yang perlu ditingkatkan kompetensinya sebanyak 585 Bumdesa. Persoalan yang umum terjadi, Bumdesa tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) dan sarana yang memadai sehingga Bumdesa tidak berjalan optimal sebagaimana diungkap dalam penelitian Sopian, dkk., (2022), Savitri Noor, L., dkk., (2023), Supriyati & Bahri (2022), Slamet Fauzan, dkk., (2022), dan Thalib, S., dkk., (2020). Akibat persoalan SDM tersebut, tidak sedikit Bumdesa yang seiring perjalanan waktu hanya menjadi sekedar nama saja, sebagai pelengkap administrasi di desa.

Secara khusus, persoalan serupa juga terjadi pada Bumdesa di Jawa Timur. Merujuk pada Data Desa Center Jawa Timur tahun 2021, kelemahan Bumdesa di Jawa Timur terlihat pada satu indikator yaitu administrasi keuangan (Lianto, 2022). Yang dimaksud dengan administrasi keuangan misalnya proses pembukuan laporan keuangan Bumdesa sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lemahnya kapasitas SDM Bumdesa terkait administrasi keuangan membuat Bumdesa tidak mampu menyajikan informasi yang memadai mengenai kondisi keuangan sebenarnya dari Bumdesa.

Permasalahan serupa juga terjadi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Merujuk pada hasil survey pendahuluan tim pengabdian masyarakat, berdasarkan data yang ada sebanyak 213 Bumdesa, sebesar 37,6% mengalami kendala akses permodalan, 18,8% Bumdesa terkendala masalah ketersediaan SDM serta 13,6% terkendala masalah administrasi pengelolaan keuangan Bumdesa. Memperhatikan kondisi Bumdesa di Tulungagung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung membuat nota kesepahaman untuk pengembangan Bumdesa.

Sebagai tindak lanjut dari note kesepahaman, tim pengabdian masyarakat Politeknik Keuangan Negara STAN mengajukan program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Bumdesa dalam pengelolaan keuangan Bumdesa. Obyek pengabdian masyarakat kali ini meliputi perwakilan pengurus operasional Bumdesa di wilayah Kabupaten Tulungagung yang membawahi 257 Bumdesa.

## **KAJIAN TEORI**

### **Modal Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)**

Salah satu tujuan program pengabdian masyarakat (pengmas) di perguruan tinggi yaitu memberikan solusi berbasis analisis situasi sesuai kebutuhan, tantangan atau persoalan yang ada di masyarakat (Budiastra, 2022). Sejalan dengan hasil survei sebagaimana dipaparkan pada bagian pendahuluan, maka program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan Bumdesa di wilayah kabupaten Tulungagung terkait pengelolaan keuangan Bumdesa.

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dalam pemberdayaan masyarakat, selain modal fisik (*physical capital*), modal finansial (*financial capital*) dan modal lingkungan (*environmental capital*) (Green dan Haines, 2002). Modal sumber daya manusia didefinisikan sebagai bakat, keahlian dan pengetahuan anggota komunitas. Davenport (1999) menjabarkan bahwa modal sumber daya manusia meliputi kemampuan manusia, pengetahuan, keterampilan, bakat, usaha dan juga waktu yang disediakan manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa modal sumber daya manusia tidaklah bersifat statis, namun dapat ditumbuhkembangkan. Menurut Backer (1964) kapasitas modal sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan diakumulasikan melalui berbagai cara seperti melalui pendidikan, pelatihan, perpindahan atau mutasi dan juga peningkatan kesejahteraan mereka sehingga mampu mengakses sumber-sumber pengetahuan.

Modal sumber daya manusia (*human capital*) juga merupakan prasyarat dapat berjalannya modal sosial yang dibutuhkan dalam pengembangan Bumdesa. Modal sosial ini dapat berupa kerja sama, solidaritas, gotong royong, percaya satu dengan yang lain serta saling keterkaitan, yang mana hal-hal tersebut dibutuhkan dalam pengembangan usaha dan membentuk jejaring sosial yang lebih inklusif dan berdampak luas (Kementerian PDDT, 2015).

### **Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa atau biasa dikenal juga dengan Bumdesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengertian ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdesa. Lebih lanjut dipaparkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Bumdesa dilakukan antara lain dengan menyampaikan laporan semesteran dan laporan tahunan.

Komponen laporan yang disertakan antara lain meliputi:

- perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
- laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha Bumdesa / Bumdesa Bersama;
- laporan mengenai keadaan dan jalannya Bumdesa / Bumdesa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
- kegiatan utama Bumdesa/Bumdesa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
- laporan mengenai tugas-tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

Lebih lanjut, pengelolaan keuangan Bumdesa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kemendes serta standar akuntansi keuangan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Bumdesa antara lain termuat dalam:

- PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa;
- Permendes PD TT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Permendes PD TT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Beberapa bertentangan dgn PP 11 2021);
- Permendes PD TT No. 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Kepmendes PD TT No. 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa;
- Kepmendes PD TT No. 145 Tahun 2022 tentang Formula Peningkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

## **METODE**

Untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan Bumdesa, program pengabdian masyarakat ini dilakukan secara bertahap. Fokus yang diambil pada program pengabdian masyarakat ini adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia (*human capital*) yang diharapkan bermuara pada peningkatan keahlian, keterampilan dan pengetahuan manusia. Untuk memastikan tujuan pengabdian masyarakat ini tercapai, tim pengabdian masyarakat menyusun program pendampingan dan pelatihan dalam beberapa tahap.

Tahap pertama adalah analisis situasi dan identifikasi permasalahan. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten

Tulungagung dalam rangka menggerakkan para pengurus Bumdesa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan keuangan Bumdesa. Dalam kegiatan ini diperoleh gambaran indikator terlemah yang terjadi pada Bumdesa yaitu administrasi keuangan. Hal tersebut terjadi pada Bumdesa dengan klasifikasi pemula ataupun maju. Selain itu, tim pengabdian masyarakat juga melakukan wawancara pendahuluan serta meninjau hasil kerja yang sedang berjalan. Klusterisasi data *profiling* Bumdesa juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang disebarakan secara *online* melalui *google form*. Pada kegiatan ini dilakukan pengklasifikasian data Bumdesa berdasarkan umur Bumdesa, omzet Bumdesa per tahun, laba Bumdesa per tahun, jumlah pegawai, nilai asset, ketersediaan SDM yang siap dalam penyusunan laporan keuangan, serta ketersediaan sarana pendukung.

Identifikasi permasalahan juga dilakukan dengan evaluasi atas implementasi pengelolaan keuangan Bumdesa yang sudah pernah dilakukan. Pada tahap ini tim melakukan *monitoring* dan wawancara dengan pengurus Bumdesa untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada termasuk di dalamnya kelemahan dan kekurangan, maupun potensi dan kelebihan yang dimiliki pengurus Bumdesa untuk memecahkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan Bumdesa. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan pelatihan dan pendampingan yang dibutuhkan.

Tahap berikutnya adalah peningkatan kapasitas SDM Bumdesa. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Bumdesa dilakukan melalui dua kegiatan yaitu pelatihan dan pendampingan serta *monitoring* Bumdes secara *sampling*. Untuk program pelatihan dan pendampingan, kegiatan disusun dalam dua rangkaian. Pelatihan pada gelombang pertama diberikan kepada calon *trainer* pengelolaan keuangan Bumdesa. Peningkatan kapasitas pengetahuan para *trainer* diukur dengan kemampuan menyelesaikan pelatihan. Para *trainer* yang sudah memenuhi kriteria penguasaan materi akan mendapat sertifikat sebagai *trainer* pengelolaan keuangan Bumdesa. Selanjutnya para *trainer* memberikan pendampingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Bumdesa pada para pengurus Bumdesa lain di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung dengan supervisi dari tim pengabdian Masyarakat. Pelatihan pada gelombang kedua diberikan kepada seluruh pengurus Bumdesa di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pasca pelatihan, pengembangan kapasitas SDM diberikan melalui tindakan *monitoring*, diskusi dan evaluasi secara berkelanjutan dalam kurun waktu 3 bulan. Untuk memastikan tujuan pengabdian masyarakat tercapai, pelatihan juga menyertakan penyelesaian test materi pelatihan serta penugasan pengerjaan pembuatan laporan keuangan masing-masing Bumdesa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

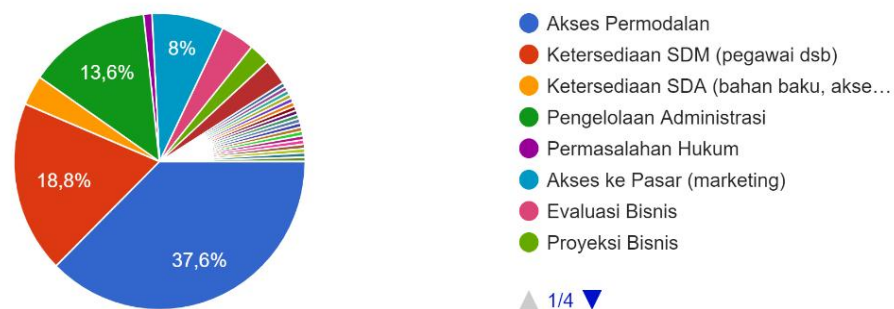
Di Kabupaten Tulungagung terdapat sebanyak 257 Bumdesa. Namun, tidak semua Bumdesa dapat berpartisipasi mengisi survei pendahuluan. Tercatat sebanyak 213 atau 82,87% Bumdesa berpartisipasi pada saat melakukan survei melalui *gform* terkait kesiapan Bumdesa untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan Bumdesa. Dari 213 Bumdesa, jika dikelompokkan

menurut umur Bumdesa, 54% Bumdes telah berumur lebih dari 5 tahun, 24,4% antara 3 – 5 th, 18,8% antara 1-3 tahun dan sisanya merupakan Bumdesa yang baru berdiri.

Untuk besaran omzet, mayoritas (atau sebesar 72,8%) Bumdesa memiliki omzet kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setahun. Sekitar 23,5% memiliki omzet antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Omzet tersebut dihasilkan dari menjalankan aneka ragam usaha. Kelompok usaha yang dominan dijalankan meliputi perdagangan, persewaan, unit simpan pinjam, pertokoan, pertanian dan penyelenggaraan jasa seperti jasa internet, jasa pembayaran, dan pariwisata.

Sesuai dengan perencanaan program pengabdian masyarakat, maka tahap pertama adalah analisis situasi dan identifikasi permasalahan. Berdasarkan data yang ada yaitu sebanyak 213 Bumdesa yang akan menjadi mitra pengmas, dilakukan mitigasi permasalahan dan diperoleh gambaran sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Secara ringkas, bahwa permasalahan Bumdesa di Tulungagung sebesar 37,6% mengalami kendala akses permodalan, 18,8% Bumdesa terkendala masalah ketersediaan SDM serta 13,6% terkendala masalah pengelolaan administrasi.

Kendala  
213 jawaban

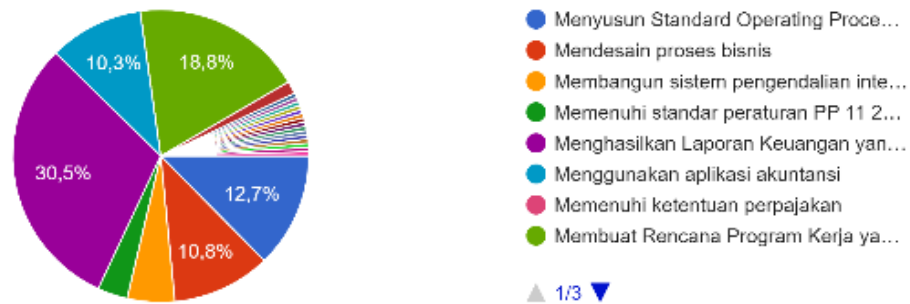


**Gambar 1.** Kendala Bumdesa di Kabupaten Tulungagung.  
**Sumber:** Dokumentasi penulis.

Meski akses permodalan menjadi kendala utama, namun sesuai dengan hasil survei diperoleh informasi bahwa Bumdesa lebih membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan keuangan BUMDesa serta pengembangan SDM sebagaimana tampak pada Gambar 2.

Apa yang Saudara harapkan dapat dilakukan setelah mengikuti pendampingan?

213 jawaban

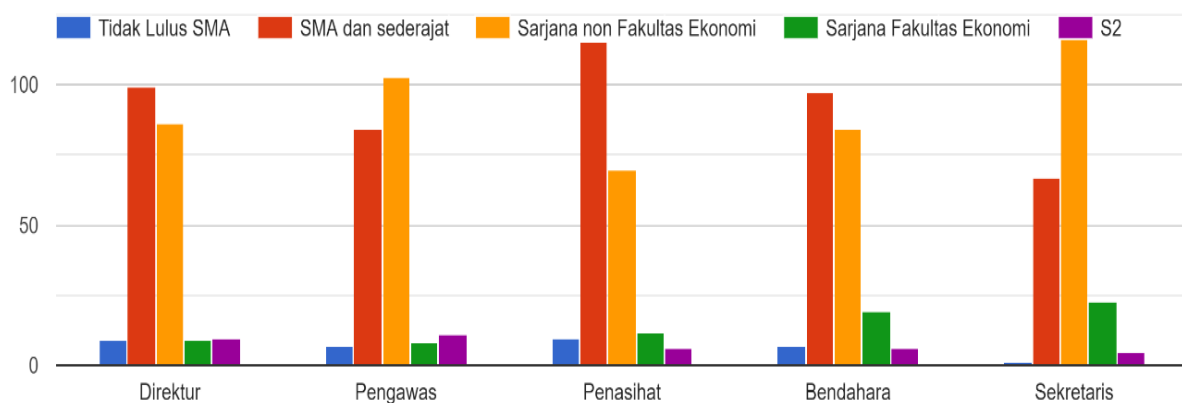


**Gambar 2.** Harapan Bumdesa di Kabupaten Tulungagung.

**Sumber:** Dokumentasi penulis.

Persoalan kedua adalah masalah SDM. Dari pendalaman informasi, BUMDesa sudah memiliki SDM pengurus pembukuan BUMDesa. Namun demikian, belum seluruh SDM tersebut memiliki latar belakang pendidikan akuntansi maupun pernah mengikuti pelatihan pembukuan. Gambar 3 menyajikan gambaran sumber daya manusia pada Bumdesa-bumdesa di Tulungagung berdasarkan pada latar belakang pendidikannya.

Pendidikan



**Gambar 3.** Latar belakang pendidikan pengurus Bumdesa di Kabupaten Tulungagung.

**Sumber:** Dokumentasi penulis.

Berdasarkan pada analisis situasi dan identifikasi masalah tersebut, maka tim pengmas merencanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk para pengurus Bumdesa dalam pengelolaan keuangan Bumdesa. Program pelatihan dan pendampingan dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari kerja untuk trainer pengelolaan keuangan Bumdesa. Kemudian pelatihan selama 3 (tiga) hari kerja untuk para pengelola Bumdesa. Pendampingan dan diskusi dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara jarak jauh kepada trainer dan pengurus Bumdesa. Adapun topik pelatihan dan pendampingan sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Matrik kegiatan pelatihan dan pendampingan *trainer* (*training of trainer*) Pengelolaan Keuangan Bumdesa Kabupaten Tulungagung.

Hari	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
1	Peningkatan pengetahuan pengelola keuangan BUMDesa di Kabupaten Tulungagung	Memberikan pengetahuan dasar terkait situasi dan kondisi, kendala dan harapan para pengurus Bumdesa di Kabupaten Tulungagung beserta permasalahan terkait pelaporan keuangan Bumdesa.
2.	Pengelolaan laporan keuangan BUMDesa menggunakan aplikasi akuntansi BUMDesa	Mengembangkan keterampilan para <i>trainer</i> dalam menyusun laporan keuangan dan memecahkan masalah dengan menggunakan aplikasi akuntansi sebagaimana diatur dalam Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

**Sumber:** diolah Penulis, 2024



**Gambar 4.** Tim pengabdian masyarakat bersama para *trainer*.  
**Sumber:** Dokumentasi penulis.

Pada pelatihan hari pertama, materi yang disampaikan secara keseluruhan ialah tentang pengenalan situasi dan kondisi Bumdesa di Tulungagung, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan Bumdesa. Pemahaman situasi dan kondisi ini penting bagi *trainer* sebagai bekal dalam melakukan pendampingan Bumdesa ke depan. Kegiatan diawali dengan pembukaan dari koordinator tim pengmas dengan pembukaan dari perwakilan Dinas PMD Kabupaten Tulungagung. Pada pelatihan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung mengirim sebanyak 20 calon *trainer* yang akan ditugaskan untuk mendampingi para pengurus Bumdesa dalam mengelola keuangan Bumdesa. Para *trainer* yang sudah mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikat *trainer* sebagaimana tampak pada Gambar 4.

Pada hari kedua, pelatihan diberikan terkait dengan pengelolaan laporan keuangan BUMDesa menggunakan aplikasi akuntansi BUMDesa. Pada sesi ini materi pelatihan mencakup dasar-dasar



akuntansi untuk BUMDesa sebagaimana diatur dalam Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, latihan soal untuk meningkatkan kemampuan analisis transaksi, memperkenalkan sistem informasi akuntansi BUMDesa melalui aplikasi sederhana berbasis Microsoft Excel untuk mengelola laporan keuangan BUMDesa serta mini praktek penyusunan laporan keuangan BUMDesa dengan aplikasi berbasis Microsoft Excel.

**Tabel 2.** Matrik kegiatan pelatihan dan pendampingan para pengurus Bumdesa Kabupaten Tulungagung.

Hari	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
1	Peningkatan pengetahuan mengelola keuangan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>In House Training</i> pengelolaan keuangan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa</li> <li>• <i>In House Training</i> pengelolaan keuangan BUMDesa sesuai dengan Pemendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama</li> </ul>
2.	Penyusunan laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi akuntansi sebagaimana diatur dalam Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.</li> <li>• Pelatihan dasar-dasar akuntansi untuk BUMDesa sebagaimana diatur dalam Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa</li> <li>• Latihan soal untuk meningkatkan kemampuan analisis transaksi</li> <li>• Memperkenalkan sistem informasi akuntansi BUMDesa melalui aplikasi sederhana berbasis Microsoft Excel untuk mengelola laporan keuangan BUMDesa.</li> <li>• Mini praktek penyusunan laporan keuangan BUMDesa dengan aplikasi berbasis Microsoft Excel</li> </ul>
3.	Pengelolaan kelengkapan administrasi keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring</i> dan diskusi secara <i>sampling</i> serta mendampingi setiap Bumdesa melakukan <i>entry</i> dokumen kelengkapan administrasi transaksi keuangan</li> <li>• Membantu menganalisis dokumen transaksi keuangan yang dihasilkan oleh BUMDesa</li> </ul>

**Sumber:** diolah Penulis, 2024



**Gambar 5.** Pembukaan program pelatihan dengan foto bersama.  
**Sumber:** Dokumentasi penulis.

Sesuai dengan program pengmas, tahap berikutnya pasca pelatihan adalah praktik pembuatan laporan keuangan Bumdesa. Pada sesi ini setiap Bumdesa diwajibkan untuk menyiapkan dokumen transaksi keuangan. Dengan adanya tahap ini maka Bumdesa terlatih untuk mengadministrasikan bukti transaksi dengan baik. Selain itu, Bumdesa yang sebelumnya tidak mempunyai laporan keuangan, setelah adanya program pengabdian masyarakat menjadi memiliki laporan keuangan, meskipun masih sederhana.

Program selanjutnya pasca pelatihan adalah *monitoring* dan supervisi. Tim Pengabdian Masyarakat bersama dengan para *trainer* yang sudah dilatih melakukan *monitoring* dan supervisi pada pengurus Bumdesa yang lain. Sesi ini juga menjadi sarana tanya jawab dan pemecahan masalah yang terjadi di masing-masing Bumdes. Keberadaan para *trainer* yang sudah dipersiapkan dirasa sangat membantu para pengurus Bumdesa.

Tahap evaluasi juga dilakukan dengan memberikan *postest* pada peserta pelatihan untuk melihat apakah terdapat perubahan pemahaman atas materi yang telah disampaikan oleh tim pengmas. Hasil *postest* menunjukkan rata-rata nilai peserta yaitu 62,5, naik dari nilai sebelumnya dengan rata-rata 52. Hal ini menunjukkan peningkatan meskipun hanya sebesar 10,5%, dikarenakan waktu pelatihan yang relatif singkat.

Secara umum, program pengabdian masyarakat ini menghasilkan beberapa luaran. Luan pertama, pengmas ini berhasil mendidik 20 (dua puluh) *trainer* untuk mendampingi Bumdesa sekabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung sebelumnya tidak memiliki *trainer* yang secara khusus disiapkan untuk memberikan pelatihan penyajian laporan keuangan Bumdesa. Salah satu tujuan program pengmas yang dirancang saat ini adalah untuk menghasilkan *trainer* yang dibutuhkan dalam pendampingan pelaporan keuangan Bumdesa. Jumlah *trainer* akan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 213 Bumdesa.

Luaran kedua, program pengabdian Masyarakat ini menghasilkan lebih banyak Bumdesa yang mampu membuat Laporan Keuangan BUMDesa secara baik dan benar. Sebelumnya tercatat 18 Bumdesa mengikuti pendampingan laporan keuangan. Pada pendampingan dengan tambahan 20 *trainer* yang dipersiapkan, mampu melatih *operator* maupun pengurus dari 213 Bumdesa di Tulungagung. Berdasarkan *monitoring* yang dilakukan terhadap pengurus BUMDesa, terdapat peningkatan Bumdesa yang sudah mampu menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi berbasis Excel. Salah satu contohnya adalah BUMDesa Ngudi Sejahtera, Ngunut, Tulungagung.

Luaran ketiga, kegiatan Pengmas di Tulungagung juga berhasil menjadikan salah satu BUMDesa, yaitu Bumdesa Ngudi Sejahtera, Ngunut, Tulungagung berhasil memperoleh predikat salah satu dari enam Bumdesa Terbaik di Propinsi Jawa Timur sebagaimana terlihat dalam link berita berikut: Masuk 6 Besar BUMDesa Terbaik Jawa Timur - Radar Tulungagung ([jawapos.com](http://jawapos.com)).

Dalam pelaksanaannya, program pengabdian masyarakat ini menghadapi kendala yang sifatnya teknis. Kendala pertama adalah koordinasi yang cukup rumit mengingat Bumdes yang terlibat mencapai 213 Bumdes dengan peserta pelatihan lebih dari 300 orang sebagaimana terlihat pada Gambar 5. Kendala kedua adalah jangka waktu yang dirasa terlalu singkat untuk materi yang cukup padat. Terkait dengan hal tersebut, disarankan bagi tim pengabdian masyarakat di masa depan untuk dapat membatasi atau membagi kelompok bumdes dalam kelompok kecil serta memperpanjang waktu pengabdian masyarakat. Selain kendala tersebut, pergantian pengurus BUMDesa, ataupun pergantian pejabat di Desa acapkali menjadi penghambat penelusuran dokumen dan catatan keuangan BUMDesa.

## **SIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berlangsung selama tiga bulan mulai dari tahap pelatihan (*offline*) sampai dengan tahap pendampingan (*online*), berdasarkan hasil evaluasi dan *monitoring* yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Para pengurus BUMDesa di Tulungagung mengalami peningkatan kompetensi terutama terkait penyusunan laporan keuangan.
- b. Metode *Training of Trainers* terhadap 20 perwakilan BUMDesa di Tulungagung, terlihat cukup efektif untuk mengakselerasi terpenuhinya kompetensi SDM pengurus BUMDesa di Tulungagung terkait penyusunan laporan keuangan
- c. Pendampingan *online* pasca pelatihan memudahkan para peserta pendampingan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dari para *trainer*.

### **Saran**

Program pengabdian masyarakat ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Bumdesa-bumdesa di Tulungagung dan sangat diapresiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung sebagai Pembina Bumdesa. Untuk menjaga keberlanjutan program peningkatan SDM Bumdesa, disarankan untuk:

- a. Meningkatkan jumlah *trainer* sehingga memenuhi kebutuhan untuk mendampingi seluruh bumdesa di Tulungagung. Pola *training of trainer* dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM Bumdesa juga dapat diterapkan di kota-kota lain di Indonesia.
- b. Pihak DPMD serta pendamping BUMDesa secara proaktif memberikan pemahaman terkait pentingnya melakukan dokumentasi ataupun pencatatan transaksi keuangan secara baik dan teratur, sehingga pengurus BUMDesa akan dimudahkan ketika menyusun laporan keuangan.
- c. Pemerintah desa disarankan menyusun *Standard Operating Procedures (SOP)* sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa terkait pergantian pengurus BUMDesa dan berita acara serah terima yang jelas, sehingga pengurus baru tidak kebingungan dalam mencari data untuk penyusunan laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2018). *IHPS II Tahun 2018*. Retrieved From BPK website: <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Backer, Gary S., (1964), *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
- Binawati, E. (2022). *Rapat Koordinasi Pendampingan BUMDesa oleh PKN STAN*. Retrieved from Paparan Rapat Koordinasi PKN STAN dan DPMD Provinsi Jawa Timur pada 13 Mei 2022.
- Budiasra, I., W. (2022). Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat, DIKTIRISTEK 2022 – 2024 Retrieved From Paparan Rapat koordinasi Pengabdian Masyarakat PKN STAN pada 10 Maret 2022.
- Davenport, Thomas O., (1999), *Human Capital: What It Is and Why People Invest It*, Michigan: Wiley
- Haines, Anna., (2009), *Asset-Based Community Development*, New York: Routledge.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta
- Lianto. (2022). *Rapat Koordinasi Awal Kegiatan Pendampingan BUMDesa Jawa Timur*. Retrieved From Paparan Rapat Koordinasi PKN STAN dan DPMD Provinsi Jatim pada 2 Februari 2022.
- Lianto. (2022). *Rapat Koordinasi Kegiatan Pendampingan BUMDesa Jawa Timur Tahap II*. Retrieved From Paparan Rapat Koordinasi PKN STAN dan DPMD Provinsi Jatim pada 11 November 2022.
- Luther, Toding. (2020). *Memberdayakan Badan Usaha Milik Desa*. Retrieved from <https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/mamuju/id/data-publikasi/berita-terbaru/2858-memberdayakan-badan-usaha-milik-desa.html>
- PKN STAN. (2022). *Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor 120.23/ /KSB/011.3/2021 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur*.
- Savitri Noor, L., Widyastuti, S., Retno, B., Susilawati, & Atenyanti. (2023). Pengembangan Mindset Kewirausahaan Bagi UMKM Binaan BUMDES Serdang Tirta Kencana Tangerang. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 5(1), 47-55. <https://doi.org/10.35814/suluh.v5i1.4074>
- Supriyati, & Bahri, R. S. (2022). Pos BUMDES dan Smart Assets Business Sebagai Peningkatan Kinerja BUMDES. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 4(1), 48-63. <https://doi.org/10.35814/suluh.v4i1.3149>
- Slamet Fauzan, Medita Wilda Wulandari, Fahmisyah, W., & Widyana Rahma Cahyani. (2022). #BUMDes Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Gubugklakah. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 3(2), 98 - 105. <https://doi.org/10.35814/suluh.v3i2.3027>
- Sopian, Maryadi, & Asqolani. (2022). BUMDESKEU untuk BUMDES Sehat dan Tangguh. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 3(2), 106 - 119. <https://doi.org/10.35814/suluh.v3i2.3143>
- Thalib, S., Hermawati, A., & Ichwani, T. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor melalui Penguatan BumDes. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 1(2), 95-104. <https://doi.org/10.35814/suluh.v1i2.1153>